



IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PENERAPAN SAK ETAP BAB 23 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2024

Deandra Prizka Riani^{1*}, Achmad Badjuri²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
Email: ¹deandraprizka99@gmail.com , ²badjuri@edu.unisbank.ac.id

Naskah Masuk Januari 2026	Naskah Direvisi Februari 2026	Naskah Diterima Februari 2026
--------------------------------------	--	--

Abstract

Tujuan: Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan serta mengevaluasi tingkat kepatuhan penerapan SAK ETAP Bab 23 tentang pendapatan pada perusahaan manufaktur tahun 2024 guna meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan.

Metode Penelitian : Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan serta proses pencatatan pendapatan di Perusahaan Manufaktur. Selain itu, dilakukan pendampingan dan evaluasi dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23.

Hasil Penelitian: Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Perusahaan Manufaktur telah menerapkan sebagian besar ketentuan SAK ETAP Bab 23, khususnya dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek pencatatan yang sistematis dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi.

Implikasi Penelitian: Implikasi dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran pihak CV A terhadap pentingnya penerapan SAK ETAP Bab 23 secara konsisten. Hasil pengabdian diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem akuntansi perusahaan sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang dirancang untuk entitas non-publik seperti usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan badan usaha non-publik lainnya. SAK ETAP memberikan pendekatan akuntansi yang lebih sederhana namun tetap andal dan relevan, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan ekonomi. Penerapan SAK ETAP juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, khususnya bagi entitas yang membutuhkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan.

Tabel 1 Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK umum

Aspek	SAK ETAP	PSAK Umum / Standar Lengkap
Kompleksitas & Ruang Lingkup	Lebih sederhana, pengaturan terbatas.	Lebih komprehensif, mencakup banyak topik (instrumen keuangan, aset tetap, pajak tangguhan, konsolidasi, dll.)
Model Pengukuran Aset / Investasi	Umumnya menggunakan cost model; tidak banyak opsi revaluasi atau nilai wajar.	Dapat menggunakan fair value / nilai wajar, revaluasi, model pengukuran lebih kompleks.
Pengungkapan & Pengaturan Transaksi Kompleks	Lebih sedikit persyaratan misalnya tidak semua transaksi kompleks diatur (instrumen keuangan, hedging, konsolidasi, derivatif, pajak tangguhan)	Pengaturan lebih lengkap sesuai kebutuhan entitas besar / publik, dengan banyak pengungkapan dan kebijakan akuntansi detail.

Salah satu bagian penting dalam SAK ETAP adalah Bab 23 tentang Imbalan Kerja, yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian imbalan kerja, termasuk kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban pascakerja merupakan hak karyawan yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan kerja jangka panjang dan wajib diakui oleh entitas sebagai liabilitas. Pengabaian pencatatan kewajiban ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

CV (Commanditaire Vennootschap) merupakan badan usaha yang banyak digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas berbentuk CV biasanya tidak memiliki struktur organisasi formal dan sering dikelola oleh pemilik mitra aktif, sehingga praktik akuntansinya sangat bergantung pada kapasitas internal. Rendahnya literasi akuntansi pada pelaku CV menyebabkan laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi seperti SAK EMKM

atau SAK ETAP. Dampaknya, laporan keuangan menjadi kurang relevan dan kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Minimnya penggunaan perangkat lunak akuntansi pada CV menyebabkan kesalahan pencatatan lebih tinggi, terutama pada pengakuan pendapatan, biaya operasional, dan penilaian aset. (Rahmawati, 2019).

Sebagian besar CV tidak memiliki sistem yang memadai untuk mencatat imbalan kerja baik imbalan jangka pendek maupun jangka panjang karena keterbatasan pemahaman mengenai kewajiban karyawan. PSAK 24 mewajibkan seluruh entitas yang mempekerjakan karyawan, termasuk CV, untuk mengakui kewajiban imbalan kerja seperti gaji, cuti, pesangon, dan manfaat pascakerja. Entitas kecil seperti CV sering hanya mengakui biaya imbalan ketika dibayar, bukan ketika kewajiban timbul, sehingga menyebabkan understatement kewajiban dan overstatement laba. (Dewi dan Firmansyah, 2020).

Dalam praktiknya, banyak entitas kecil dan menengah, termasuk Commanditaire Vennootschap (CV), belum sepenuhnya menerapkan ketentuan SAK ETAP Bab 23. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman akuntansi, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta fokus perusahaan pada pencatatan transaksi kas harian. Akibatnya, kewajiban imbalan pascakerja sering kali tidak diakui maupun disajikan dalam laporan keuangan, sehingga menimbulkan risiko salah saji material, khususnya pada akun liabilitas dan saldo laba.

Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dengan omset Rp 499.336.990.963 berdomisili di Jepara sebagai entitas non-publik yang menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya juga menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan hasil audit tahun 2024, ditemukan bahwa CV A belum mengakui dan menyajikan kewajiban imbalan pascakerja sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi atas tingkat kepatuhan CV A dalam menerapkan standar tersebut guna memastikan kewajaran dan keandalan laporan keuangan.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang SAK ETAP Bab 23

Lemahnya pengendalian internal pada CV meningkatkan risiko salah saji baik secara sengaja (fraud) maupun tidak sengaja (error). Kekurangan dokumentasi transaksi memperbesar risiko auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Apabila CV diaudit oleh KAP, risiko salah saji material akan berdampak langsung terhadap kemungkinan modifikasi opini audit, terutama apabila terdapat kewajiban tidak diakui atau ketidaksesuaian dengan SAK ETAP (Wibowo dan Prabowo, 2020)



Gambar 2. Analisis Tingkat Kepatuhan CV A terhadap SAK ETAP Bab 23

(Sumber : Dokumentasi pribadi)

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan studi kasus. Kegiatan diawali dengan pelatihan mengenai penerapan SAK ETAP Bab 23 tentang pendapatan, dilanjutkan dengan pendampingan dalam penerapan pencatatan dan penyajian pendapatan pada CV A tahun 2024. Selanjutnya dilakukan evaluasi kepatuhan penerapan SAK ETAP Bab 23 dengan membandingkan praktik akuntansi sebelum dan sesudah pendampingan. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui laporan keuangan CV A tahun 2024, data kepegawaian, kebijakan perusahaan terkait imbalan kerja, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Analisis Kepatuhan

Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi CV A dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban imbalan pascakerja.



Gambar 3. Menjelaskan Temuan Audit CV A
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

3. Evaluasi Dampak Akuntansi

Dilakukan evaluasi terhadap dampak ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan, terutama pada akun liabilitas, beban, laba, dan ekuitas.

4. Perumusan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan CV A terhadap SAK ETAP Bab 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa CV A telah mencatat imbalan kerja jangka pendek seperti gaji dan upah sebagai beban operasional. Namun, CV A belum melakukan pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan ketentuan SAK ETAP Bab 23. Akibatnya, kewajiban tersebut tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan pascakerja tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun 2024.

1. Dampak terhadap Laporan Keuangan

Tidak diakuinya kewajiban imbalan pascakerja menyebabkan total liabilitas perusahaan menjadi understated, sementara laba dan ekuitas berpotensi overstated. Selain itu, ditemukan saldo akun utang lain-lain yang signifikan serta koreksi saldo laba (defisit) yang mengindikasikan adanya risiko salah klasifikasi dan salah saji material dalam laporan keuangan CV A.

2. Tingkat Kepatuhan CV A

Berdasarkan kriteria kepatuhan terhadap SAK ETAP Bab 23, CV A dinilai belum patuh, khususnya dalam:

- a. Pengakuan kewajiban imbalan pascakerja.
- b. Pengakuan beban imbalan pascakerja.
- c. Penyajian kewajiban imbalan pascakerja secara terpisah dalam laporan keuangan.

Ketidakpatuhan ini berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan dari sisi keandalan dan relevansi informasi.

3. Perbaikan Pengakuan dan Pengukuran

CV A disarankan untuk melakukan perhitungan kewajiban imbalan pascakerja sesuai peraturan ketenagakerjaan dan ketentuan SAK ETAP Bab 23, serta mengakui kewajiban tersebut sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

4. Perbaikan Penyajian dan Klasifikasi Akun

Perusahaan perlu menyajikan kewajiban imbalan pascakerja secara terpisah dari akun utang lain-lain serta mengakui beban imbalan pascakerja dalam laporan laba rugi secara periodik.



Gambar 4 Menjelaskan Perbaikan Penyajian & Klasifikasi Akun
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

5. Peningkatan Kepatuhan dan Pengendalian

CV A disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan pengendalian internal terkait penerapan SAK ETAP Bab 23 agar kesalahan serupa tidak terulang pada periode berikutnya.



Gambar 6 Menjelaskan Peningkatan Kepatuhan dan Pengendalian
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

KESIMPULAN

Hasil Kegiatan yang telah dilakukan serta bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan penerapan SAK ETAP Bab 23 tentang pendapatan pada CV A tahun 2024. Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV A pada umumnya telah menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23. Pendapatan telah diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diperoleh dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan standar, khususnya terkait dengan kelengkapan pencatatan, dokumentasi transaksi, serta pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai standar akuntansi serta belum adanya pedoman akuntansi tertulis yang diterapkan secara konsisten di perusahaan.

Melalui kegiatan pendampingan dan evaluasi, CV A memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan SAK ETAP Bab 23 secara konsisten guna meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Dengan adanya perbaikan dalam pencatatan dan pengungkapan pendapatan sesuai standar, diharapkan laporan keuangan CV A dapat menjadi lebih akurat, transparan, serta bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

REFERENSI

- Alfitri, A. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jupe UNS*, Vol. 2, No.2.
- Arens, A. E. (2017). *Auditing and assurance services (16th ed.)*. Pearson.
- Dewi, E. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Bandar Lampung. *Jurnal Digital Rerpositora UNILA*.
- Indonesia, I. A. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, I. A. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: IAI.
- Indonesia, I. A. (2020). *PSAK 24: Imbalan Kerja*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Jayanti, I. G. (2022). Pengakuan Liabilitas Imbalan Pascakerja: Suatu Penilaian Going Concern. *Politeknik Negeri Bali*.
- Kasim, E. (2017). Analisis pengaruh pengakuan imbalan kerja terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 134–147.
- Kieso, D. E. (2018). *Intermediate accounting (IFRS Edition)*. Canada: Wiley.
- Kurnia, H. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja Jangka Pendek pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Berdasarkan SAK ETAP BAB 23. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Lijow, T. F. (2021). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 9(2).
- Marsha, N. &. (2020). Pengaruh liabilitas imbalan kerja terhadap leverage dan risiko perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 45–56.
- Nazarudin, F. A. (2025). Analisa imbalan pasca kerja berdasarkan SAK ETAP Bab 23 dan pengaruhnya terhadap opini auditor atas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Integra*, 15(1).
- Norkamsiah, A. I. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 13, No. 2.
- Rahmawati, N. (2019). Kendala pelaporan keuangan pada CV di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 210–221.
- Rizki Rudiantoro, S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9.
- Wibowo, A. & Prabowo (2020). Pengaruh pengendalian internal terhadap risiko salah saji pada usaha kecil. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*(11(2)), 290–302.
- Wijaya, K. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Universitas Labuhanbatu*, Vol. 6, No. 2.
- Wulandari, A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja : Kesesuaiannya dengan SAK ETAP BAB 23 tentang Imbalan Kerja pada Salon dan SPA Muslimah Awrada Tanjungpinang. *STIE Pembangunan Tanjungpinang*.
- Yolanda, A. (2025). Evaluasi Kelengkapan Data Transaksi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada PT ABC. *Universitas Lampung*.

